

**Efektivitas Program Subsidi Dana Sumbangan Pendidikan (DSP)
Sekolah Dasar, Menengah dan Kejuruan Kota Cilegon**

Oleh:
Cepi Safruddin Abd. Jabar
(Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan)

Abstract

Educational subsidy program (DSP subsidized) is a supporting program for achieving K-12 compulsory education program in Kota Cilegon. Through the program, Local governments try to eliminate/reduce citizen's expenditures for education phase by phase. This program (DSP subsidized) is aimed to subsidy admission program in first year's school. The purposes of research as such: First, try to describe the adequacy of the program in helping schools achieve their effectiveness. Second, describe how schools utilized the DSP program for finance school activities.

This work is using descriptive framework as a guideline. The research was involving 32 SDs (elementary schools), 10 SMPs (Junior High schools), 5 SMAs (High schools), and 2 SMKs (Vocational High schools) as a research samples. Data gathering was using questionnaires and documentation study.

The finding shows that (23.8%) schools declare that adequacy of DSP program could meet 80%-90% school teaching and learning activity needs. For quality improvement, 23.8% schools explain that program could meet 100% needs. For procurements and maintenance, 38.1% school said that the program could meet 40%-70% school needs. Majority schools said that the program could meet 40%-70% school needs for student affairs. 47.6% schools said that the program could meet less than just 40% school prosperity. For supporting school governance, 26.3% school said that the program could meet less than 40% school needs.

Keywords: DSP subsidized, adequacy, effectiveness, efficiencies

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan saat ini masih mengalami permasalahan terutama terkait dengan ketersediaan jumlah dana yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kondisi ini mendesak pemerintah daerah selaku penerima mandat otonomi daerah untuk segera melakukan penyusunan rencana pembangunan pendidikan secara terprogram dan berkelanjutan dalam kaitannya dengan penetapan besaran dana sumbangan pendidikan (DSP). Berpedoman pada prioritas

pembangunan Kota Cilegon Bidang Pendidikan yang telah mengamanatkan Program Wajib Belajar 12 Tahun, alokasi pembiayaan pembangunan bidang pendidikan lebih difokuskan pada upaya peningkatan mutu pendidikan, dan juga penurunan komponen biaya yang harus ditanggung orang tua murid untuk membiayai siswa sampai ke jenjang pendidikan menengah.

Pemerintah kota Cilegon saat ini memang belum mampu menggratiskan pendidikan 100% sehingga orang tua murid mendapat kewajiban membayar berbagai macam sumbangan pendidikan. Agar beban biaya pendidikan orang tua murid tidak terlalu besar, pemerintah daerah mempertimbangkan perlu berupaya melakukan pembebasan dana sumbangan pendidikan siswa baru dan uang transportasi bagi guru terpencil. Harapannya, pendidikan bagi masyarakat menjadi lebih murah, namun tetap berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah selalu berupaya melakukan pengidentifikasian masalah, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sampai dengan implikasi kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan pendidikan sebaik-baiknya.

Memahami pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, pendanaan pendidikan sesungguhnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat. Untuk itu, pemerintah bersama masyarakat luas perlu memahami prinsip subsidi yang adil, yaitu subsidi diprioritaskan bagi golongan rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan agar golongan masyarakat tersebut dapat menikmati pendidikan yang memenuhi standar mutu minimal. Konsep subsidi yang berkeadilan ini menjadi salah satu prioritas program untuk disosialisasikan agar dipahami dengan baik oleh masyarakat luas dan juga direalisasikan.

Realisasi subsidi berkeadilan ini perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai implementasi kebijakan dan program Pembangunan Pendidikan Kota Cilegon sebagaimana diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cilegon 2006-2010. Penerapan subsidi berkeadilan ini merupakan program pendukung penuntasan wajib belajar (wajar) pendidikan 12 tahun, sesuai janji

pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis melalui 6 (enam) kebijakan strategis Kota Cilegon yang dikenal dengan nama *Enam Pintu Gawe Utama*. Oleh karena itu, kesungguhan implementasi subsidi berkeadilan ini hendaknya sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan program. Melalui subsidi ini, pemerintah daerah secara bertahap perlu menghilangkan berbagai macam pungutan dalam penerimaan peserta didik.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan sebagai berikut: a) Sejauhmana tingkat Ketercukupan Program Kompensasi DSP terhadap efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Sekolah? Dan b) Sejauhmana efektivitas penggunaan dana Program Kompensasi DSP oleh sekolah?

Pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan, memperoleh, mengalokasikan, dan mengelola biaya atau dana pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks karena aspek dana/biaya begitu luas antara lain mencakup: sumber-sumber biaya/dana, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang dapat diukur dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya tingkat sekolah (Supriadi, 2004). Selain itu, kegiatan pembiayaan juga merupakan kegiatan yang penting karena setiap kegiatan pendidikan selalu membutuhkan dana/biaya, dan ketidakmampuan dalam melakukan manajemen pembiayaan pendidikan akan menghambat penyelenggaraan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan cenderung membutuhkan perubahan atau penyesuaian dari waktu ke waktu karena pembiayaan pendidikan, sebagai salah satu kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal pendidikan, baik bersifat makro maupun mikro. Salah satu indikator hal ini adalah besaran jumlah atau angka biaya/dana pendidikan pada satuan pendidikan yang tidak pernah sama dari tahun ke tahun. Biaya dan pembiayaan pendidikan (sekolah) dalam skala nasional dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu: geografis, komposisi dan besar populasi; perencanaan pendidikan, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi (Clark, dkk, 1998: 2). Pelaksanaan

berbagai perubahan atau penyesuaian pembiayaan pendidikan mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

Pengertian luas biaya dikemukakan oleh Bowen (1980:1), yaitu "*payments made to acquire goods and services*", dan Jones (1985: 5), yaitu "*that which must be given up in order to gain something else*". Jadi, biaya adalah segala sesuatu yang dikeluarkan untuk memperoleh sesuatu yang lain.

Untuk penyelenggaraan pendidikan, segala sesuatu yang perlu diadakan antara lain guru, gedung, alat tulis, peralatan dan perlengkapan, waktu siswa, dll. Ini berarti biaya pendidikan adalah "seluruh sumber daya yang diperhitungkan baik yang berupa moneter maupun non moneter, yang secara langsung maupun tidak langsung diperlukan untuk menunjang proses pendidikan (Nurhadi; 1990 dalam diktat kuliah Ekonomi Pendidikan). Definisi senada dikemukakan oleh Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2000: 5 yaitu: biaya pendidikan merupakan seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (*input*) baik berupa barang (*natura*) atau berupa uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan sesungguhnya tidak sekedar uang, namun juga waktu, tenaga, materil, dan juga kesempatan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif Berbagai informasi akan disajikan sesuai kondisi lapangan sebenarnya dan dianalisis secara kuantitatif sebagai dasar penerapan subsidi pendidikan bagi SD, SMA, dan SMK kota Cilegon. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sekolah yang telah memenuhi standar mutu pendidikan minimal. Adapun responden dalam penelitian ini adalah orang tua murid untuk memberikan data tentang biaya pendidikan langsung dan tidak langsung yang ditanggung, masyarakat (perwakilan) untuk memberikan data tentang aspirasi masyarakat kota Cilegon terhadap pendidikan, para kepala sekolah untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan di sekolah, dan personel Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk memberikan data tentang profil SD, SMA, dan SMK di kota Cilegon dan pendanaan yang diberikan. Sampel dari penelitian ini sebanyak 49 sekolah, dimana ada sebanyak 32 SD negeri, 10 SMP Negeri, dan 2 SMK.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan studi dokumentasi. Jenis angket yang digunakan adalah campuran: terbuka-tertutup dan studi dokumentasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel dalam penelitian ini variatif. Untuk jenjang Sekolah Dasar, dari 32 sampel yang dipilih, ada sebanyak 25 sampel yang datanya bisa diolah. Untuk jenjang SMP Negeri, dari 10 sekolah yang dijadikan responden, baru 2 sekolah yang mengembalikan instrumennya. SMA Negeri dan SMK Negeri, belum mengirimkan kembali instrumen yang diberikan.

Untuk jenjang SD Negeri, dari 24 Sekolah yang diteliti, 21 sekolah (87,5%) berkategori sekolah potensial, 1 (satu) sekolah berstatus SSN (Sekolah Standar Nasional), dan 2 (dua) berkategori Rintisan SSN. Jenjang SMP, dari 2 sekolah yang diteliti, semuanya berkategori Rintisan SSN.

Dari 24 SD yang diteliti, rata-rata jumlah guru di sekolah tersebut antara 13-18 orang. Tidak semua sekolah memiliki tenaga Tata Usaha, hanya ada 4 sekolah yang memiliki tenaga Tata Usaha, masing-masing 1 (satu) orang. Demikian pula dengan tenaga Pustakawan, hanya ada 3 sekolah yang memiliki tenaga pustakawan khusus. Masing-masing sekolah tersebut memiliki 1 (satu) orang tenaga pustakawan. Hanya ada satu sekolah yang memiliki tenaga teknisi sumber belajar. Lainnya tidak.

1. Ketercukupan Subsidi Biaya Pendidikan dalam Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan Persekolahan

Dari segi ketercukupannya (*adequacy*) dana dari program Kompensasi DSP, ada beberapa hal yang disoroti. **Pertama**, sejauhmana program kompensasi DSP mampu membiayai penyelenggaraan proses belajar belajar atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan sekolah. **Kedua**, sejauhmana program kompensasi belajar mampu membiayai proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah. **Ketiga**,

sejauhmana kemampuan program kompensasi DSP membiayai pemeliharaan sarana dan pra sarana pendidikan. **Keempat**, sejauhmana kemampuan Program kompensasi DSP membiayai kegiatan-kegiatan kesiswaan di sekolah. **Kelima**, sejauhmana kemampuan program kompensasi DSP mampu memberikan kesejahteraan pada guru atau sekolah. **Keenam**, sejauhmana program kompensasi DSP mampu membiayai kebutuhan biaya rumah tangga sekolah. Mulai dari penyediaan ATK sampai dengan membiayai keperluan oprasional manajemen sekolah secara umum.

a. Kemampuan Program Kompensasi DSP Membiayai Penyelenggaraan PBM/ KBM

Paling banyak responden (23,8%) menyatakan bahwa kemampuan kompensasi DSP membiayai kebutuhan penyelenggaraan PBM/KBM adalah antara 80%-90% kebutuhan PBM/KBM yang ada. Semua opsi pertanyaan pada angket terisi. Dimana yang menyatakan bahwa kemampuan program Kompensasi DSP mampu mencukupi 100% kebutuhan PBM/KBM sebanyak 14,3%. Antara 90%-100% 4 orang, 70%-80% sebanyak 19,0%, antara 40%-70% sebanyak 9,5%. Sedangkan yang menyatakan berkemampuan di bawah 40% sebanyak 14,3%.

b. Kemampuan Program Kompensasi DSP Membiayai Peningkatan Mutu

Dalam hal peningkatan mutu, paling banyak responden (23,8%) menyatakan bahwa program ini mampu mencukup semua (100%) kebutuhan upaya peningkatan mutu. Yang menyatakan berkemampuan antara 90%-100% sebanyak 9,5%, antara 80%-90% sebanyak 14,3%, antara 70%-80% sebanyak 19,0%, antara 40%-70% dinyatakan oleh 19,0%, dan yang menyatakan kurang dari 40% dinyatakan oleh 14,3% responden.

c. Kemampuan Program Kompensasi DSP Membiayai Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Pra Sarana

Dalam pemeliharaan sarana dan pra sarana belajar, kemampuan program Kompensasi DSP membiayai semua kebutuhan tersebut juga ditanggapi beragam. Paling banyak responden (38,1%) menyatakan berkemampuan antara 40%-70% saja. Yang menyatakan mampu mencukupi 100% adalah 9,5%, antara 90%-100% sebanyak 4,8%, antara 80%-90% sebanyak 14,3%, antara 70%-80% sebanyak 19,0%, dan kurang dari 40% sebanyak 14,3%.

d. Kemampuan Program Kompensasi DSP Membiayai Kegiatan Kesiswaan

Kemampuan program ini dalam membiayai kegiatan-kegiatan kesiswaan juga ditanggapi beragam oleh sekolah. Paling banyak sekolah (23,8%) menyatakan antara 40%-70% saja. Yang menyatakan mampu mencukup 100% kebutuhan kegiatan kesiswaan sebanyak 19,0% responden, antara 90%-100% sebanyak 9,5%, antara 80%-90% sebanyak 9,5%, antara 70%-80% sebanyak 19,0%, dan kurang dari 40% sebanyak 19,0%.

e. Kemampuan Program Kompensasi DSP Membiayai Kesejahteraan Guru/Sekolah

Kemampuan Program Kompensasi DSP dalam membiayai Kesejahteraan ditanggapi beragam juga oleh responden. Paling banyak responden (47,6%) menyatakan bahwa kemampuan program kompensasi DSP kurang dari 40% saja. Tetapi walaupun begitu ada juga yang menyatakan mampu mencakup 100% kebutuhan sebanyak 14,3%. Yang menyatakan antara 90%-100% sebanyak 9,5%, antara 80%-90% sebanyak 4,8%, antara 70%-80% sebanyak 4,8%, dan yang menyatakan berkemampuan antara 40%-70% sebanyak 19%.

f. Kemampuan Program Kompensasi DSP Membiayai Kebutuhan Rumah Tangga Sekolah

Dalam membiayai semua kebutuhan rumah tangga sekolah, program Kompensasi DSP oleh kebanyakan (26,3%) responden diyakini hanya mampu mencukup kurang dari 40% kebutuhan rumah tangga sekolah. Walaupun begitu, ada yang menyatakan pula bahwa program ini mampu mencukup 100% kebutuhan rumah

tangga sekolah oleh 10,5% responden. Ada 15,8% responden yang menyatakan berkemampuan antara 90%-100%. Antara 80%-90% dinyatakan oleh 15,8% responden, antara 70%-80% oleh 10,5%, dan antara 40%-70% oleh 21,1% responden.

Analisis yang dilakukan nampaknya akan ada sedikit ketidaklengkapan detail profil pembiayaan untuk jenjang SMA dan SMK mengingat instrumen untuk jenjang tersebut belum ada yang kembali ke peneliti. Tetapi walaupun begitu, data sekunder yang ada di Bapeda membantu peneliti dalam melakukan analisis lanjut mengenai profil pembiayaan di jenjang tersebut.

2. Ketercukupan Subsidi Biaya Pendidikan dalam Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan Persekolahan

Ada dua konteks yang bisa digali dalam menganalisis tingkat efektivitas program kompensasi DSP terhadap penyelenggaraan pendidikan persekolahan. Pertama dilihat dari konteks biaya yang harus ditanggung masyarakat; dan kedua dilihat dari konteks biaya yang dikelola oleh sekolah. Mengapa kedua konteks ini harus disandingkan dalam menganalisis tingkat efektivitas program kompensasi DSP ini? Ada beberapa alasan yang sangat mendasar. Yaitu belum ada suatu panduan umum yang secara tegas dan rinci mengatur mengenai pengelolaan dan pendayagunaan DSP di sekolah-sekolah. Dana-dana yang diserap dari orang tua/wali/masyarakat melalui DSP atau bentuk lainnya, serta pendayagunaannya oleh sekolah tidak diawasi baik peruntukan ataupun pengelolaannya oleh Pemerintahan Kota.

Kedua alasan itu menyebabkan mekanisme dan sistem pengelolaan serta pendayagunaan dana-dana masyarakat yang diserap sekolah bervariasi di setiap sekolah. Ini yang menyebabkan belum sepadannya asumsi dan persepsi tentang sumber dana masyarakat diantara pemerintah kota dengan sekolah. Selain itu, kedua hal diatas menyebabkan sistem penganggaran pendidikan yang dilakukan sekolah dan pemerintah kota belum sepenuhnya terpadu. Konsep MBS yang dipegang sebagai panduan penyelenggaraan pengelolaan oleh sekolah sering belum seiring dan sejalan

dengan konsep administrasi publik yang dipegang sebagai panduan penyelenggaraan pengelolaan daerah oleh Pemerintah Kota.

Melihat efektivitas program kompensasi DSP dari konteks masyarakat dimaksudkan untuk melihat sampai sejauhmana tujuan program kompensasi DSP – meringankan beban masyarakat dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka-tercapai. Dalam analisis ini akan dibahas mengenai perbandingan antara besarnya biaya yang harus ditanggung masyarakat dalam membiayai belanja pendidikan langsung melalui DSP sekolah dengan dana yang disediakan pemerintah kota dalam program kompensasi DSP. Dari perbandingan itu akan terlihat seberapa besar kekuatan program kompensasi DSP bisa meringankan beban masyarakat tersebut.

Dengan mempertimbangkan konteks biaya yang dikelola sekolah, analisis efektivitas program kompensasi DSP ini akan melihat sejauhmana program ini mampu menggantikan peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di sekolah. Sejauhmana program subsidi pendidikan ini memberikan efek terhadap efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam praktiknya, analisis dari segi konteks ini adalah membandingkan seberapa besar biaya yang bersumber dari program kompensasi DSP mampu membiayai belanja-belanja yang biasanya dibiayai oleh sumber masyarakat seperti biasanya.

3. Efektivitas Program Kompensasi DSP dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

Besaran dana yang berasal dari Program Kompensasi DSP disetiap sekolah tidak sama. Dari data APBS yang ditemukan, nampak bahwa setiap sekolah mendapat proporsi yang berbeda-beda. Rentangan rata-rata dana yang diterima sekolah dari program kompensasi DSP sangat luas. Untuk SMPN mulai dari 9,1% sampai dengan 44,7% (dari belanja langsung); untuk SMAN mulai dari 15,0% sampai dengan 38,5% (dari belanja langsung), dan untuk SMKN 25,1% sampai dengan 30,4%. Ini menyebabkan standar deviasinyapun besar (kecuali untuk SMKN). Besarnya perbedaan jumlah dana program kompensasi DSP antar sekolah ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor, diantaranya adalah ukuran kelas, besarnya murid, jumlah tenaga, dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada –tetapi walaupun ada beberapa komponen dan item pembiayaan yang diseragamkan.

Besarnya standar deviasi rata-rata alokasi dana dari Program Kompensasi DSP di tingkat SMP dan SMA sejalan pula dengan bervariasinya pula besaran pungutan yang dilakukan sekolah terhadap masyarakat (kecuali untuk SMKN). Masih adanya pungutan ini menandakan bahwa sekolah masih merasa kekurangan dana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan pendidikan masyarakat. Tetapi walaupun begitu, dengan adanya program kompensasi DSP ini, suka atau tidak, menyebabkan berkurangnya beberapa jenis pendapatan sekolah yang bersumber dari masyarakat. Namun di sisi lain, juga adanya beberapa jenis pendapatan baru membiayai beberapa komponen pembiayaan penting yang berasal dari kompensasi DSP ini.

Program Kompensasi DSP ini menyebabkan ‘hilangnya’ pendapatan sekolah yang berasal dari SPP (tingkat SD dan SMP), DSP siswa kelas I, dan Biaya Daftar Ulang. Namun di sisi lain, sekolah mendapatkan pendapatan baru, yaitu dana untuk BOP (diluar anggaran rutin), pengadaan sarana dan pra sarana pendidikan, kesejahteraan (transport guru), dan pembiayaan rumah tangga sekolah.

Secara umum, Program Kompensasi DSP yang digulirkan pemerintah Kota Cilegon memiliki dampak dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pendidikan di Kota Cilegon mulai dari jenjang SD (negeri), sampai dengan SMA/SMK (negeri). Program Kompensasi DSP dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan PBM, peningkatan mutu, pemeliharaan sarana dan pra sarana pendidikan, kegiatan kesiswaan, dan kesejahteraan guru. Jika kita ingin mengukur sampai sejauhmana kemampuan program kompensasi DSP itu bisa membiayai setiap kegiatan yang disebutkan tadi, penelitian ini menemukan fakta bahwa jawabannya akan beragam. Hal ini disebabkan karena proporsi dana dari Program kompensasi DSP ini proporsinya berbeda-beda untuk setiap kegiatan di setiap sekolah.

Kemampuan Program Kompensasi DSP dalam Penyelenggaraan PBM ditanggapi beragam oleh sekolah. Dari mulai kurang dari 40% sampai dengan mampu mencukupi 100% kebutuhan untuk keperluan penyelenggaraan PBM. Ini menandakan bahwa alokasi dana dari sumber program kompensasi DSP oleh sekolah beragam –walaupun begitu paling banyak sampel yang menyatakan kompensasi DSP mampu membiayai kebutuhan untuk penyelenggaraan PBM antara 80%-90%. Besaran persentase untuk alokasi dana kompensasi DSP bagi penyelenggaraan PBM ini bisa berbeda bisa dikarenakan beberapa hal. Pertama, tidak setiap sekolah mengalokasikan dana kompensasi DSP untuk item pembelanjaan yang sama; kedua, variabel penentu besaran biaya PBM setiap sekolah berda-beda; dan ketiga, memang alokasi dana kompensasi DSP dari pemerintah Kota juga berbeda untuk setiap sekolah. Selain itu, kegiatan penyelenggaraan PBM ini juga dibiayai oleh sumber lain. Misalnya dari anggaran rutin, atau dari sumber lainnya.

Kemampuan Program Kompensasi DSP dalam kegiatan peningkatan mutu pendidikan juga ditanggapi beragam oleh sekolah. Ini juga sama pertimbangannya seperti dalam penyelenggaraan PBM. Setiap sekolah mengalokasikan dana yang bersumber dari program kompensasi DSP pada komponen yang berbeda-beda. Kebanyakan sampel penelitian mengalokasikan dana yang bersumber dari program kompensasi DSP ini untuk kegiatan peningkatan mutu. Kegiatan yang didanai oleh sumber ini adalah untuk penjaminan mutu hasil belajar siswa, mulai dari proses evaluasi hasil sampai dengan upaya peningkatannya.

Ada hal yang menarik dalam melihat kemampuan program Kompensasi DSP dalam membiayai pemeliharaan sarana dan pra sarana. Banyak sekolah (Sekolah Dasar) yang beranggapan bahwa kemampuan program ini hanya 40%-70% saja dari kebutuhan pemeliharaan sarana dan pra sarana sekolah. Untuk jenjang SMP sampai dengan SMA/SMK, alokasi dana untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana pendidikan cukup besar, yakni 60,5% dari keseluruhan anggaran program kompensasi DSP. Mengingat besarnya anggaran untuk pengadaan sarana dan pra sarana pendidikan ini menandakan kesungguhan yang luar biasa dari pemerintah kota

untuk meningkatkan sarana pendukung yang menunjang efektivitas pencapaian tujuan pendidikan dan peningkatan mutu SDM dan membantu meringankan masyarakat tentunya dalam menyediakan sarana dan pra sarana pendidikan.

Kegiatan kesiswaan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah nampaknya kurang mendapat perhatian yang lebih dari program kompensasi DSP ini. Ini tercermin dari rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kemampuan program kompensasi DSP untuk membiayai kegiatan kesiswaan di sekolah. Sekolah menyatakan bahwa program ini hanya membiayai program kesiswaan antara 40%-70% saja.

Untuk ukuran kesejahteraan, kebanyakan sekolah beranggapan bahwa program kompensasi DSP hanya mampu membiayai belanja kesejahteraan guru/sekolah kurang dari 40% saja. Untuk kegiatan yang satu ini, nampaknya baik pemerintah ataupun sekolah dihadapkan pada suatu situasi yang sulit. Sampai dengan saat ini semua pihak belum menemukan formulasi yang benar-benar dipahami dan rasional serta diterima oleh semua pihak tentang konsepsi atau parameter sejahtera. Akibatnya, perbedaan persepsi tentang kesejahteraan guru sampai dengan saat ini terus menjadi polemik. Kejadian yang sama juga terjadi untuk kegiatan pembiayaan rumah tangga sekolah. Kebanyakan sekolah menyatakan bahwa program kompensasi DSP hanya mampu membiayai kebutuhan rumah tangga sekolah sebesar kurang dari 40% saja.

KESIMPULAN

Program Kompensasi DSP merupakan program yang digulirkan Pemerintah Kota Cilegon yang tujuannya adalah untuk mengambil alih sebagian kewajiban partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan dengan harapan dampak dari program ini bisa meringankan beban pengeluaran ekonomi masyarakat. Program ini baru mencapai sasaran masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya disekolah-sekolah negeri saja mulai dari jenjang SD sampai dengan pendidikan menengah (SMA dan SMK).

Tingkat adekuasi/ketercukupan program, paling banyak responden (23,8%) menyatakan bahwa kemampuan kompensasi DSP membiayai kebutuhan penyelenggaraan PBM/KBM adalah antara 80%-90% kebutuhan PBM/KBM yang ada. Sedangkan untuk peningkatan mutu, paling banyak responden (23,8%) menyatakan bahwa program ini mampu mencukup semua (100%) kebutuhan upaya peningkatan mutu. Dan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan, paling banyak responden (38,1%) menyatakan berkemampuan antara 40%-70% saja.

Untuk kegiatan pembinaan kesiswaan, program kompensasi DSP dipandang kebanyakan sekolah hanya mampu menunjang 40%-70% kebutuhan program kesiswaan. Untuk kesejahteraan guru/tenaga/sekolah, paling banyak responden (47,6%) menyatakan bahwa kemampuan program kompensasi DSP kurang dari 40% saja. Untuk menunjang kebutuhan rumah tangga sekolah, program Kompensasi DSP oleh kebanyakan (26,3%) responden diyakini hanya mampu mencukup kurang dari 40% kebutuhan rumah tangga sekolah.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi (2000) *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jogjakarta: FIP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bowen, Howard R. (1981). *The Cost of Higher Education How Much Do Colleges and Universities Spend How Much Should They Spend?.* San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Bray, Mark (1996) *Decentralization of Education: Community Financing*. Washington: World Bank.
- Clark, dkk. (1998). *Financing of Education in Indonesia, Asian Development Bank & Comparative Education Research Centre*. Jakarta: The University of Hongkong
- Cohn, Elchanan. (1979). *The Economics of Education Revised Edition*. Massachusetts: A Subsidiary of Harper & Row Publisher, Inc.
- Fattah, Nanang. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya
- Johns, Roe L, Edgar I. Morphet dan Kern Alexander. (1983). *The Economics & Financing of Education Fourth Edition*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Jones, Thomas H. (1985). *Introduction to School Finance Technique and Social Policy*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Nurhadi, Mulyani A. dkk. (2004). *Laporan Penelitian Analisis Biaya Satuan Pendidikan Di Kabupaten Sleman*. Sleman.
- Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdikbud. (2000). *Pengkajian Pembiayaan Pendidikan dari Masa ke Masa*. Jakarta: Balitbang-Depdikbud.
- Supriadi, Dedi. (2002). *Analisis Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosdakarya.

Biodata

Cepi Safruddin Abd. Jabar, Sumedang, 31 Agustus 1974. Dosen tetap Jurusan Administrasi Pendidikan. Pendidikan S1 Jurusan Administrasi Pendidikan IKIP Bandung tahun 1993, S2 Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, tahun 2003. Kandidat doktor pada Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Indonesia terdaftar tahun 2006.